

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Mawardi, Imam. *Ahkam Sulthaniyah : Sistem Pemerintahan Khilafah Islam/Imam al-Mawardi : penerjemah, Khalifaurrahman Fath & Fathurrahman*, Jakarta : Qitshi Press, 2014.
- Amin, N. *Paradigma Teologi Politik Sunni, Melacak Abu Al Hasan Al Asy'ari*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015.
- Asshidique, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Anggara, Sahya. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung : Pustaka Setia, 2013.
- Arake, Lukman “*Hadis-Hadis Politik dan Pemerintahan*” cetakan pertama. Bantul : Yogyakarta, 2020.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan : Unpamm Press, 2018.
- Bawaslu, *Indeks Kerawanan Pemilu 2019 (IKP 2019), Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden, Cetakan Pertama*. Jakarta : Bawaslu, 2018.
- Dedi, Syarial. dkk. *Fiqh Siyasah, cetakan pertama*. Rejang Lebong : LP2 IAIN Curup, 2019.
- Damanik, Ali Said. *Fenomena Partai Keadilan : Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah Di Indonesia*. Jakarta : Teraju, 2002.
- Gaffar, Janedri M. *Hukum Pemilu Dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi*. Jakarta : Konstitusi Pres, 2013.
- Herlambang, Saifuddin. *Pemimpin dan Kepemimpinan Dalam al-Qur'an, Sebuah Kajian Hermeneutika, Meluruskan Salah Paham tentang Memilih, Mematuhi, dan Mema'zulkan Pemimpin, Cet. 1*. Pontianak : Ayunindya, 2018.
- Hilal, Fatmawati. *Fiqh Siyasah*. Makassar : Pustaka Almaidah, 2015
- Huda, Ni'matul. *Mewujudkan Daulat Rakyat Melalui Pemilu Yang Berkualitas*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2019.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah , Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, edisi pertama*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2014.
- Irwansyah, *Hukum Tata Negara, Diktat Fakultas Syari'ah & Hukum, UIN Sumatera Utara*. Medan, 2018.

Isra, Saldi. *Sistem Pemerintahan Indonesia, 1st ed.* Depok: Raja Grafindo Persada, 2019.

Kompas, Litbang. *Partai-Partai Politik Indonesia, Ideologi dan Program 2004-2009.* Jakarta : Kompas, 2009.

Labolo, Muhadam. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia. Teori, Konsep dan Isu Strategis, cet. 1.* Jakarta : Raja Grafindo, 2015.

Miaz, Yalvema. *Partisipasi Politik, Pola Perilaku Pemilih Pemilu Masa Orde Baru dan Reformasi.* Padang : UNP Press. 2012.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum.* Mataram : Mataram University Press, 2020.

Muhtadi, Burhanuddin. *Dilema PKS : Suara dan Syariah.* Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia, 2012.

Muntoha, “Kriteria Kepala Negara dalam Sistem Politik Islam, Telaah Sosio-Historis Terhadap Hadits Politik,” (Laporan Penelitian, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1996), h. 1.

Nainggolan, Bestian Nainggolan & Yohan Wahyu, *Partai Politik Indonesia 1999-2019, Konsentrasi dan Dekonsentrasi Kuasa.* Jakarta : Kompas Media Nusantara, 2016.

Partai Keadilan Sejahtera, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera (AD ART PKS),* 2021.

Sekretariat Jenderal Bawaslu RI, *Kajian Sistem Kepartaian, Sistem Pemilu, Sistem Presidensiil,* 2015.

Sumodiningrat, Gunawan & Ary Ginanjar Agustian. *Mencintai Bangsa dan Negara Pegangan Dalam Hidup Berbangsa dan Bernegara di Indonesia.* Bogor : PT. Sarana Komunikasi Utama, 2008.

Widayati. *Problematika Presidential Threshold Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Yang Berkeadilan, cet. 1.* Semarang : Unissula Press, 2019.

Jurnal

Abdul Ghoffar, “Problematika Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengalaman di Negara Lain,” *Jurnal Konstitusi*.15, 3 (2018) : 2.

Ahmad Khoirul Fata, “Kepemimpinan Dalam Perspektif Pemikiran Politik Islam,” *Jurnal Review Politik* 2,1. (Juni 2012) : 3.

Zulham, "Sistem Pemerintahan Islam (Menurut al-Ghazali dan Abu al-A'la al Maududi)," *Al-Muqaranah : jurnal Perbandingan Hukum dan Mazhab* 2, 2 (Januari-Desember 2014) : 7.

Pengajuan Gugatan Perkara

Ringkasan Permohonan Perkara Partai Keadilan Sejahtera Nomor 73/PUU-XX/2022 "Ketentuan Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (Presidential Threshold

Undang-Undang

Indonesia, *Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik*, (LN No. 8 Tahun 2011, TLN No. 5189), ps. 1.

Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, ps. 6a ayat 2.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pemilu, UU No. 7 Tahun 2017*, (LN No. 182 Tahun 2017, TLN No 6109), ps. 222.

Presiden Republik Indonesia, *Penjelasan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik*. h. 1.

Presiden Republik Indonesia, *Penjelasan Atas Undang-Undang Tentang Pemilu, UU No. 7 Tahun 2017*, ps. 222.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

Wawancara

Marasakti, Kasman. Ketua Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan (DPD PKS). Wawancara Pribadi. Medan, 27 Mei 2022.

Taufik, Muhammad. Bidang Hukum & Kebijakan Publik Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan (DPD PKS), Wawancara Pribadi, Medan, 4 Agustus 2022.

Sagala, Rajudin. Bidang Hukum & Kebijakan Publik Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan (DPD PKS), Wawancara Pribadi, Medan, 4 Agustus 2022.

Website

Humas PKS, 2022. “*Siaran Pers Musyawarah Majelis Syura VI PKS*”, diakses 13 Februari 2022. <https://pks.id/content/siaran-pers-musyawah-majelis-syura-vi-pks>.

Kamarudin, 2021. “*Oposisi Politik*”, diakses 11 Januari 2022 <https://pks.id/content/oposisi-politik>.

Kumparan, PKS: Ada Banyak Kader dan Pengurus Daerah Kami yang Nonmuslim. <https://kumparan.com/kumparannews/pks-ada-banyak-kader-dan-pengurus-daerah-kami-yang-nonmuslim-1xO81T7fuYz/full>. Diakses pada 09 Agustus 2022.

Mulyadi, Didik. 2019. *Prof Dr Mahfud MD Usulkan pada Pilpres 2024 Presidential Threshold harus Diturunkan, ini Alasannya*. diakses 03 Agustus 2022. <https://surabaya.tribunnews.com/2019/07/15/prof-dr-mahfud-md-usulkan-pada-pilpres-2024-presidential-threshold-harus-diturunkan-ini-alasannya>.

Saputra, Andi. 2021. “*Gugatan Presidential Threshold 0%: 13 Kali Ditolak MK, Kini Digugat Lagi*”, diakses 12 Februari 2022 <https://news.detik.com/berita/d-5846286/gugatan-presidential-threshold-0-13-kali-ditolak-mk-kini-digugat-lagi>.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 (Bab 4 Pasal 222)

-137-

2017, No.182

oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN.

BAB VI

PENGUSULAN BAKAL CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
DAN PENETAPAN PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN DAN PENCALONAN ANGGOTA DPR, DPD, DPRD
PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Bagian Kesatu

Tata Cara Penentuan, Pengusulan, dan Penetapan Pasangan
Calon

Paragraf 1

Tata Cara Penentuan Pasangan Calon

Pasal 221

Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

Pasal 222

Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.

B. Surat Selesai Penelitian di Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan



Nomor : 153/K/AB-12-SEK-PKS/2022
Lampiran : -,-
Hal : **Surat Keterangan Riset**

Medan, 08 Agustus 2022

Kepada Ykh,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas nikmat Iman dan Islam, semoga limpahan rahmat dan karunianya senantiasa di berikan kepada kita semua. Sholawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW, Nabiullah panutan kita, semoga syafa'at selalu tercurah kepada pengikutnya yang setia. Amin

Sehubungan dengan surat Nomor : B.30/SH.III/PP.00.9/04/2022 tertanggal 05 April 2022 perihal Izin Riset yang ditujukan kepada Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Medan maka DPD PKS Kota Medan, memberikan keterangan bahwa:

Nama : Sangra Arsa
NIM : 0203182121
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Semester : VIII
Judul Skripsi : **Ambang Batas Calon Presiden Pada UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Dalam Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan).**

Telah selesai melaksanakan riset di Kantor DPD PKS Kota Medan yang beralamat di Jl. Sei Batangkuis No. 34, Kelurahan Babura Kecamatan Medan baru pada tanggal 04 Agustus 2022.

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan, semoga Allah SWT memberikan kemudahan langkah untuk kita semua, atas kerja samanya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

**DEWAN PENGURUS DAERAH PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
KOTA MEDAN**


Dr. Rudiawan Sitorus, M.Pem.I
SEKRETARIS

Tembusan :

1. Ketua Umum DPD PKS Kota Medan
2. Saudara Sangra Arsa

Jl. Sei Batang Kuis No. 34, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan 20154
Telp. +6261 4154231

C. Wawancara Kasman Marasakti Lubis (Ketua DPD PKS Medan)



SUMATERA UTARA MEDAN

D. Selesai Wawancara H. Rajudin Sagala (Bidang Hukum & Kebijakan Publik PKS Medan)



E. Wawancara Muhammad Taufiq (Bidang Pemenangan Pemilu & Pilkada DPD PKS Medan)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Kota Medan, pada tanggal 23 agustus 1999, putra dari pasangan suami-istri Pak Kurnia Indra, dan Bu Eklima S.pd.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD di SD Muhammadiyah 13 Medan pada tahun 2011, tingkat SLTP di SMP Negeri 14 pada tahun 2014, dan tingkat SLTA di SMK Negeri 4 Medan pada tahun 2017, kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Syari'ah & Hukum UIN Sumatera Utara mulai tahun 2018.

Pada masa menjadi mahasiswa, penulis mengikuti aktivitas kemahasiswaan, yaitu Unit Kegiatan Olahraga Mahasiswa UIN Sumatera Utara.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN